

Efektivitas Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dalam Meningkatkan *Civic disposition* Siswa Pada Kurikulum Merdeka

Yusi Parwati^{a,1*}, Nadya Putri Saylendra^{a,2}, Yogi Nugraha^{a,3}

^a Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia

¹ pk19.yusiparwati@mhs.ubpkarawang.ac.id*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 20 Agustus 2023;

Revised: 28 Agustus 2023;

Accepted: 10 September 2023.

Kata-kata kunci:

Civic disposition;

Pendidikan Pancasila;

Kurikulum Merdeka.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pembelajaran pendidikan Pancasila dalam meningkatkan *civic disposition* siswa dalam konteks Kurikulum Merdeka. *Civic disposition* ini mencakup elemen-elemen seperti rasa cinta tanah air, saling menghormati, dan karakter kewarganegaraan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan pengambilan sampel dari siswa kelas XI di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Karawang. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan uji regresi linear sederhana, uji validitas, dan uji koefisien determinasi. Dari hasil analisis uji T menunjukkan bahwa nilai thitung 10,107 dan nilai ttabel 1,982 hal ini dapat diartikan nilai thitung > ttabel ($10,107 > 1,982$) dengan nilai signifikansi pada uji T $0,00 < 0,05$. Sehingga keputusan yang dapat diambil adalah pembelajaran pendidikan Pancasila berpengaruh dan signifikan terhadap peningkatan *civic disposition* siswa. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang sejauh mana pembelajaran pendidikan Pancasila dalam Kurikulum Merdeka dapat berkontribusi dalam meningkatkan *civic disposition* siswa. Temuan ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pengembangan kurikulum dan strategi pembelajaran yang lebih efektif dalam membentuk karakter kewarganegaraan yang kuat pada generasi muda Indonesia.

ABSTRACT

Keywords:

Civic disposition;

Pancasila Education;

Independent Curriculum.

The Effectiveness of Pancasila Education Learning in Improving Students' Civic disposition in the Independent Curriculum. his research aims to measure the effectiveness of Pancasila education learning in improving students' civic disposition in the context of the Independent Curriculum. This civic disposition includes elements such as love of the country, mutual respect, and civic character. The research method used was quantitative descriptive research with samples taken from class XI students at Public Senior High School 5 Karawang. Data was collected through questionnaires and analyzed using simple linear regression tests, validity tests, and coefficient of determination tests. From the results of the T test analysis, it shows that the tcount value is 10.107 and the ttable value is 1.982. This can be interpreted as the tcount > ttable value ($10.107 > 1.982$) with a significance value in the T test of $0.00 < 0.05$. So the decision that can be taken is that learning Pancasila education has a significant and significant impact on increasing students' civic disposition. It is hoped that the results of this research will provide a better understanding of the extent to which learning Pancasila education in the Merdeka Curriculum can contribute to improving students' civic disposition. These findings can provide valuable insights for the development of curricula and learning strategies that are more effective in forming strong civic character in Indonesia's young generation.

Copyright © 2023 (Yusi Parwati, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Parwati, Y., Saylendra, N. P., & Nugraha, Y. (2023). Efektivitas Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dalam Meningkatkan Civic Disposition Siswa Pada Kurikulum Merdeka. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(9), 310–316.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

<https://doi.org/10.56393/decive.v3i9.1782>

Pendahuluan

Masyarakat Indonesia sangat memegang teguh etika dan nilai-nilai yang baik. Ini merupakan salah satu karakteristik unik dari masyarakat Indonesia. Karakter sering dianggap sebagai sesuatu yang positif, karena berkaitan erat dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh individu (Nugraha, Y. 2019). Lebih lanjut Mulyono (2017) menjelaskan watak kewarganegaraan (*civic disposition*) mencakup berbagai aspek karakter individu sebagai warga negara, seperti tanggung jawab moral, pengendalian diri, dan penghormatan terhadap martabat individu. Sementara karakter publik melibatkan perhatian terhadap sesama warga negara, perilaku yang sopan, kepatuhan terhadap hukum, kemampuan berpikir kritis, dan keterbukaan untuk berpartisipasi dalam dialog dan kesepakatan. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia harus memiliki watak kewarganegaraan sebagai bekal untuk menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pendidikan merupakan salah satu lingkungan yang mampu membentuk watak kewarganegaraan (*civic disposition*) pada generasi penerus bangsa. Hal ini telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 yang membahas tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”

Mengacu pada undang-undang tersebut, bahwa dengan adanya pendidikan mampu menciptakan generasi muda dalam hal ini berarti siswa menjadi seseorang yang berkualitas sehingga mampu bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Di zaman yang semakin berkembang, menimbulkan masuknya budaya baru yang tumbuh di masyarakat. Sehingga pembentukan watak kewarganegaraan masyarakat harus ditingkatkan agar terciptanya hidup rukun antar warga negara sebagaimana pendapat Nugraha, Y., & Firmansyah, Y. (2019) Sikap toleransi menjadi sebuah hal penting dan perlu digiatkan kembali. Perubahan jaman memasuki era revolusi industri 4.0. Berdasarkan pendapat tersebut dapat diketahui bahwa sikap toleransi merupakan modal awal untuk terciptanya hidup rukun antar warga negara. Sikap toleransi dalam konteks ini berarti sikap menghargai perbedaan dan mampu hidup berdampingan dengan perbedaan tersebut. Sehingga sikap toleransi ini berhubungan dengan pembentukan watak kewarganegaraan (*civic disposition*). Sebagai salah satu tempat terjadinya pembentukan watak kewarganegaraan, maka dari itu dalam pelaksanaan pendidikan harus berjalan dengan baik. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia agar dapat meningkatkan kualitas siswa yang berkualitas juga. Salah satu upaya pemerintah adalah dengan menerapkan kurikulum yang sesuai dengan tuntutan zaman.

Kurikulum adalah suatu perencanaan pendidikan yang memiliki posisi yang sangat penting. Karena pentingnya peran kurikulum dalam dunia pendidikan, maka dalam proses penyusunannya, harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang kuat dan kokoh, sebagaimana disebutkan oleh (Azis, 2018) Ini berarti bahwa kurikulum berfungsi sebagai panduan atau pedoman dalam proses pendidikan, yaitu sebagai rencana pembelajaran (*plan for learning*). Saat ini pemerintah melalui kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi telah menerapkan kurikulum baru yaitu Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka diperkenalkan sebagai tanggapan terhadap hasil PISA yang menunjukkan bahwa sekitar 70% siswa berusia 15 tahun di Indonesia memiliki pemahaman bacaan sederhana atau penerapan konsep matematika dasar di bawah standar minimum. Selama dekade terakhir, skor PISA ini tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan perbedaan yang signifikan dalam kualitas pendidikan antara wilayah dan kelompok sosial-ekonomi, dan situasinya semakin kompleks karena dampak pandemi COVID-19 (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2023).

Sebagai kurikulum yang bertujuan untuk memulihkan pembelajaran setelah masa pandemi COVID-19, kurikulum merdeka memiliki ciri utama yaitu: (1) Pelaksanaan pembelajaran berorientasi proyek dengan tujuan utama dalam pengembangan keterampilan *soft skills* dan karakter yang sejalan dengan profil pelajar Pancasila (2) Peningkatan fokus pada materi inti dengan alokasi waktu yang memadai untuk mendalami pembelajaran terkait kompetensi dasar, seperti literasi dan numerasi (Barlian et al., 2022). Dapat dilihat bahwa karakteristik paling utama pada kurikulum ini adalah untuk membentuk siswa yang memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut yaitu dengan menerapkan pendidikan kewarganegaraan. Sesuai dengan peraturan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 37 ayat (1) dan (2), Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dijelaskan sebagai mata pelajaran yang harus diajarkan dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Selain itu, PKn juga merupakan mata kuliah yang harus diambil sebagai bagian dari kurikulum pendidikan tinggi.

Pada Kurikulum Merdeka, terjadi perubahan nama mata pelajaran PPKn menjadi Pendidikan Pancasila. Perubahan ini telah diresmikan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022, yang merupakan amendemen dari PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. PP Nomor 4 Tahun 2022 mengatur perubahan pada Pasal 40 PP Nomor 57 Tahun 2021. Pasal 40 ini menjelaskan bahwa kurikulum harus mencakup mata pelajaran wajib seperti pendidikan agama, pendidikan pancasila, dan bahasa Indonesia. Perubahan nama PPKn menjadi pendidikan Pancasila tidak mengubah fokus pembelajaran dari keduanya, keduanya tetap berfokus pada Pancasila, undang-undang dasar tahun 1945, bhinneka tunggal ika, dan negara republik Indonesia. Penggunaan istilah "Pendidikan Pancasila" dalam konteks mata pelajaran di Kurikulum Merdeka mencerminkan komitmen pemerintah untuk membentuk peserta didik yang memiliki akar nilai dan moral dalam Pancasila. Selain itu, dengan memasukkan Pendidikan Pancasila dalam kurikulum ini, Kurikulum Merdeka juga memiliki tujuan untuk membentuk karakter kewarganegaraan serta mengembangkan keterampilan sosial dan karakter melalui pelaksanaan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila.

Fenomena menurunnya kualitas *civic disposition* dikalangan siswa ditandai dengan menurunnya rasa cinta tanah air, saling menghormati satu sama lain terlebih lagi sekarang ini telah memasuki masa setelah pandemic covid-19 yang mengharuskan masyarakat untuk stay at home dan mengurangi interaksi dengan orang lain, peristiwa tersebut sangat memengaruhi ciri khas bangsa indonesia yang terkenal akan keramahannya dan peristiwa ini juga yang merupakan salah satu faktor yang membuat siswa menjadi seseorang yang lebih asyik menyendiri. Selain itu Krisis moral yang sedang dihadapi oleh Indonesia saat ini merupakan suatu permasalahan yang sangat mengkhawatirkan dan telah berdampak serius terutama pada kalangan remaja. Perilaku-perilaku ini tidak dapat dianggap remeh, karena mereka cenderung menuju tindakan yang melanggar nilai-nilai Pancasila, seperti contohnya tawuran dan tindak kriminal yang semakin marak di Indonesia (Nugraha, Y. 2015)

Berdasarkan fenomena tersebut peneliti ingin meneliti tentang “efektivitas pembelajaran pendidikan Pancasila dalam meningkatkan *civic disposition* siswa pada kurikulum merdeka dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar efektivitas pembelajaran pendidikan dalam meningkatkan *civic disposition* siswa pada kurikulum merdeka.

Metode

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 5 Karawang dengan jumlah populasi 432 orang siswa kelas XI tahun ajaran 2023/2024. Pengambilan sample menggunakan teknik *Probability Sampling* dengan metode *random sampling*. Data yang dikumpulkan yaitu dengan cara menyebarkan kuesioner sedangkan analisis data meliputi uji T, uji validitas, dan uji koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pada penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Hasil uji validitas pada kuesioner yang berisikan 22 pertanyaan/ Pernyataan mengenai pengaruh pembelajaran pendidikan Pancasila dalam kurikulum merdeka. Sampel yang digunakan dalam uji validitas ini terdiri dari 36 responden, dengan taraf signifikansi 5% dalam pengujian kuesioner menunjukkan hasil yang valid yaitu telah memenuhi syarat uji validitas yang mengharuskan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$. Diketahui nilai t_{tabel} sebesar 0,329. Karena hasil uji validitas pada instrument penelitian yaitu kuesioner dinyatakan valid, maka kuesioner tersebut dapat digunakan untuk penelitian. Sample yang diambil pada penelitian ini berjumlah 108 orang yakni 25% dari 432 jumlah populasi. Suharsimi Arikunto (2010) menerangkan bahwa metode seleksi sampel tergantung pada jumlah subjek penelitian. Apabila jumlah subjek kurang dari 100 orang, direkomendasikan untuk mengambil seluruh populasi. Namun, jika jumlah subjek melebihi 100 orang, dapat dipilih sekitar 10-15% atau 20-25% dari total populasi.

Berdasarkan penyebaran kuesioner yang disebarakan ke 108 responden kelas XI SMA Negeri 5 Karawang yang berisikan 22 pertanyaan/ Pernyataan tentang pengaruh pembelajaran pendidikan Pancasila dalam kurikulum merdeka menunjukkan hasil persentase sebesar 80,42%. Persentase tersebut masuk kedalam kelas interval 68,1% - 84,00% dengan kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi pendidikan Pancasila di SMA Negeri 5 Karawang sudah berjalan dengan baik. Dalam hal ini tujuan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sebagaimana yang disampaikan oleh Akbal (2016) bahwa tujuan pendidikan kewarganegaraan yaitu untuk memastikan bahwa semua warga negara, terutama generasi muda, memiliki sikap nasionalisme dan cinta tanah air yang berakar pada nilai-nilai dan etika Pancasila, serta nilai-nilai dan norma yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Proses pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang baik akan mewujudkan siswa yang memiliki watak kewarganegaraan yang baik pula. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari pembelajaran pendidikan Pancasila dalam kurikulum merdeka terhadap peningkatan *civic disposition* siswa, maka diperlukan uji T yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Hasil Uji T

Coefficients ^a		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	31,681	4,469		7,088	0,000
	Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Pancasila dalam Kurikulum Merdeka	0,507	0,050	0,701	10,107	0,000

a. Dependent Variable: Peningkatan *Civic disposition* Siswa

(Sumber: Output SPSS 25)

Dari tabel diatas maka dapat diketahui bahwa nilai signifikansi bernilai 0,000 hal ini sudah dipastikan bahwa nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 dengan nilai t_{hitung} 10,107 dan nilai t_{tabel} 1,982 hal ini dapat diartikan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($10,107 > 1,982$) dengan nilai signifikansi pada uji T $0,00 < 0,05$. Sehingga keputusan yang dapat diambil adalah pembelajaran pendidikan Pancasila berpengaruh dan signifikan terhadap peningkatan *civic disposition* siswa. Untuk mengetahui persentase pengaruh pembelajaran pendidikan Pancasila terhadap peningkatan *civic disposition* dapat dilakukan dengan uji koefisien determinasi. Berikut hasil uji koefisien determinasi pada penelitian ini:

Tabel 2. Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.701 ^a	0,491	0,486	5,732

a. Predictors: (Constant), Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Pancasila dalam Kurikulum Merdeka

(Sumber: Output SPSS 25)

Hasil uji koefisien determinasi diatas menunjukkan bahwa nilai R Square pada tabel diatas memiliki hasil senilai 0,491 yang di persentasekan menjadi 49,1%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran pendidikan Pancasila dapat mempengaruhi peningkatan *civic disposition* sebesar 49,1% serta 50,9% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain seperti lingkungan keluarga dan masyarakat.

Mengacu pada hasil uji T dan hasil uji koefisien determinasi dapat diketahui bahwa pendidikan Pancasila dalam kurikulum merdeka dalam mata pelajaran yang mampu memberikan dampak positif bagi peningkatan *civic disposition* siswa serta mampu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam kurikulum merdeka pendidikan Pancasila dihadirkan untuk membangun generasi muda agar siap menghadapi tantangan global. Penerapan nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan melalui berbagai kegiatan yang dapat memperkuat dan menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila. Hal ini menjadi penting karena pengaruh globalisasi telah membuat sebagian siswa lupa akan nilai-nilai Pancasila (Fatimah, Y., Sanusi, AR., Nugraha, Y 2019). Generasi muda yang mampu bersaing dalam era global perlu memiliki dasar karakter yang kokoh. Hubungan antara pembelajaran Pendidikan Pancasila dan perkembangan *civic disposition* menunjukkan bahwa Pendidikan Pancasila merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kecerdasan nasional. Dalam Konteks Kurikulum Merdeka, pembelajaran Pendidikan Pancasila dirancang agar menjadi pengalaman belajar yang menarik dan menyenangkan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi: "Penerapan pendidikan Pancasila melalui program Merdeka menekankan pada proses pembelajaran yang menyenangkan dan relevan, sehingga anak-anak kita dapat memahami bagaimana menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari"

Pada hakikatnya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan mengupas topik kewarganegaraan, etika, nilai-nilai, peraturan, serta interaksi antar warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan merujuk kepada Prinsip-prinsip Pancasila dan Konstitusi 1945. Hal ini di pertegas oleh H. A. Kosasih Djahiri yang menyatakan PKn atau Pendidikan Kewarganegaraan merupakan suatu program pendidikan yang bertujuan untuk mengajarkan prinsip-prinsip pragmatis dan prosedural yang berusaha untuk mengembangkan sifat kemanusiaan, budaya, serta memberikan kekuatan kepada individu, khususnya siswa, agar mereka dapat menjadi warga negara yang baik sesuai dengan tuntutan yang diakui secara moral dan konstitusional oleh negara.

Visi-misi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sebagaimana yang dikemukakan oleh Susanto (2016) yaitu visi dari mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah menjadi pelajaran kunci dalam membentuk karakter bangsa dan memberdayakan warga negara. Sementara itu, misi dari mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah membentuk individu warga negara yang bertanggung jawab, yaitu individu yang mampu menjalankan hak dan kewajiban mereka dalam konteks kehidupan berbangsa. Lebih lanjut Budimansyah (2010) menyatakan bahwa ada beberapa kompetensi inti yang memegang peran penting dalam membentuk individu yang menjadi warga negara yang baik dan cerdas adalah (1) Kemampuan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah sebagai bagian dari masyarakat global; kemampuan untuk bekerjasama dengan individu lain dan mengemban tanggung jawab dalam tugas mereka dalam masyarakat. (2) Kemampuan untuk memahami, menerima, menghargai, serta memberikan respon terhadap keberagaman budaya. (3) Kemampuan berpikir secara kritis dan sistematis, dan memiliki tekad untuk menyelesaikan pertikaian tanpa kekerasan. (4) Kemampuan dan tekad untuk mengubah cara hidup dan pola konsumsi demi menjaga lingkungan, serta kemampuan untuk meningkatkan kesadaran dan memperjuangkan hak asasi manusia, seperti hak-hak

perempuan dan minoritas. (5) Kemampuan dan tekad untuk aktif berpartisipasi dalam proses politik, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Kompetensi tersebut harus dimiliki oleh generasi muda sebagai modal untuk menghadapi tantangan global.

Terdapat beberapa faktor penting yang mampu mempengaruhi pembelajaran pendidikan Pancasila terhadap peningkatan *civic disposition* yaitu mencakup (1) Materi Pembelajaran: Materi pembelajaran merupakan elemen kunci dalam proses pembelajaran. Ini mencakup berbagai unsur, seperti informasi, konsep, prinsip, dan langkah-langkah. Dalam Pendidikan Kewarganegaraan, fokusnya adalah pada pembentukan karakter kewarganegaraan, pemahaman, serta penghayatan nilai-nilai dan penerapan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar filosofis dan pandangan hidup bangsa. (2) Media Pembelajaran: Media pembelajaran adalah alat penting dalam proses belajar-mengajar. Fungsinya adalah sebagai sarana untuk menyampaikan informasi, merangsang pemikiran, emosi, dan motivasi siswa, yang akhirnya berdampak pada proses pembelajaran mereka. Media pembelajaran membantu dalam mengklarifikasi materi yang diajarkan dan membuat pembelajaran lebih menarik serta menyenangkan. (3) Strategi Pembelajaran: Pemilihan strategi dan metode pembelajaran memiliki peran yang sangat penting dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Karena mata pelajaran ini berkaitan erat dengan nilai-nilai, pemilihan strategi dan metode harus dilakukan dengan hati-hati. Tujuannya adalah agar siswa dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai yang diajarkan, sehingga dapat berdampak positif pada perkembangan karakter mereka. (4) Evaluasi atau Penilaian Pembelajaran: Evaluasi atau penilaian pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang direncanakan secara baik, terstruktur, dan berkelanjutan. Fungsinya adalah untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data mengenai proses dan hasil belajar siswa. Evaluasi ini membantu guru untuk memahami sejauh mana siswa telah mencapai pemahaman dan penerapan konsep serta nilai-nilai yang diajarkan dalam pembelajaran.

Semua faktor tersebut memiliki perannya masing-masing dan saling berkolaborasi dalam proses peningkatan *civic disposition* siswa. Selain faktor diatas, seorang guru juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas *civic disposition*. Menurut Nugraha, Y (2017) Seorang guru memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan peserta didiknya. Mengarahkan adalah tugas guru untuk membimbing anak-anak didik dalam pembelajaran dan perilaku yang positif, baik itu di lingkungan kelas maupun di masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memotivasi siswa dalam proses belajar di sekolah.

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner kepada 108 siswa kelas XI di SMA Negeri 5 Karawang, kuesioner tersebut berisi 18 pertanyaan/pernyataan terkait peningkatan *civic disposition* siswa. Hasil dari penyebaran kuesioner tersebut menunjukkan persentase sebesar 85,01% dan masuk dalam kriteria sangat baik. Hal ini berarti bahwa siswa memiliki watak kewarganegaraan dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Selain lingkungan pendidikan yang memiliki pengaruh dalam proses pembentukan dan peningkatan *civic disposition* generasi muda, peran lingkungan keluarga dan masyarakat juga memiliki pengaruh yang besar. Hal tersebut telah dibuktikan dengan hasil uji koefisien determinasi yang menunjukkan bahwa 50,9% proses peningkatan *civic disposition* dipengaruhi dari luar lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, lingkungan pendidikan, keluarga, dan masyarakat diharapkan mampu bekerjasama dalam meningkatkan kualitas *civic disposition* para generasi penerus bangsa.

Simpulan

Berdasarkan hasil T dan uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa pendidikan Pancasila dalam kurikulum merdeka memiliki dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan *civic disposition* siswa. Pendidikan Pancasila dihadirkan dalam kurikulum merdeka untuk membangun generasi muda yang siap menghadapi tantangan global dengan dasar karakter yang kokoh. Pengembangan *civic disposition* melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kecerdasan nasional dan membentuk individu yang bertanggung

jawab. Pembelajaran Pendidikan Pancasila dalam konteks Kurikulum Merdeka dirancang agar menjadi pengalaman belajar yang menarik dan menyenangkan. Kompetensi inti yang ditekankan dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah penting dalam membentuk individu yang menjadi warga negara yang baik dan cerdas. Faktor-faktor seperti materi pembelajaran, media pembelajaran, strategi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran memiliki peran penting dalam peningkatan *civic disposition* siswa. Hasil penyebaran kuesioner menunjukkan bahwa siswa memiliki tingkat *civic disposition* yang sangat baik, yang menunjukkan efektivitas pembelajaran Pendidikan Pancasila. Selain lingkungan pendidikan, lingkungan keluarga dan masyarakat juga memiliki pengaruh besar dalam pembentukan *civic disposition* siswa. Dalam rangka meningkatkan *civic disposition* generasi muda, penting bagi lingkungan pendidikan, keluarga, dan masyarakat untuk bekerja sama.

Referensi

- Akbal, M. (2016). Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Pembangunan Karakter Bangsa.
- Azis, R. 2018. Implementasi Pengembangan Kurikulum. *Inspiratif Pendidikan*, 7(1), 44. <https://doi.org/10.24252/ip.v7i1.4932>
- Barlian, U. C., Solekah, S., dan Rahayu, P. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Journal of Education and Language Research*, 10(1), 1–52. <https://doi.org/10.21608/pshj.2022.250026>
- Budimansyah, D. (2010). *Penguatan pendidikan kewarganegaraan untuk membangun karakter bangsa*. Bandung: Widya Akasara Press.
- Fatimah, Y., Sanusi, A. R., & Nugraha, Y. (2019). Hambatan Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kegiatan Organisasi Siswa Intra Sekolah (Osis) Di SMPN 4 Klari. *CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 56-63.
- Gunawan, H. (2014). *Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. 2023. *Latar Belakang Kurikulum Merdeka*. Merdeka Mengajar: <https://pusatinformasi.guru.kemdikbud.go.id/hc/en-us/articles/6824331505561-Latar-Belakang-Kurikulum-Merdeka> (diunduh pada 4 Februari 2023)
- Mulyono, B. 2017. Reorientasi *civic disposition* dalam kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan sebagai upaya membentuk warga negara yang ideal. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 14(2), 218–225. <https://doi.org/10.21831/civics.v14i2.17007>
- Presiden Republik Indonesia. 2003. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia. 2003. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 37 ayat (1) dan (2). Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia. 2023. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta.
- Susanto, E. 2016. *Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Terhadap Pengembangan Civic disposition Siswa Sma N Se-Kota Bandar Lampung*. 1(1), 96–105.
- Nugraha, Y., & Firmansyah, Y. (2019). Karakter Toleransi Beragama dalam Sudut Pandang Generasi Milenial. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 4(2), 69-76. <https://doi.org/10.21067/jmk.v4i2.3856>
- Nugraha, Y. (2019). Pendidikan dalam Pembentukan Karakter dan Peradaban Indonesia. *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Kewarganegaraan*.
- Nugraha, Y. (2015). Pengaruh Kinerja Guru Pkn dan Ilkim Belajar Terhadap Perkembangan Sikap Disiplin Peserta Didik (Studi Survey pada Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Karawang). Tesis, Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- Nugraha, Y. (2017). Pengaruh Kinerja Guru Pkn Dan Iklim Belajar Terhadap Motivasi Belajar Siswa. *Wahana Karya Ilmiah Pendidikan*, 1(01).